

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA**



**MAUMERE
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban formal pengguna anggaran sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target kinerja 3 tahun yang direncanakan sesuai dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama disusun berorientasi hasil serta memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja perangkat daerah.

Demikian laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Maumere, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka,



VALERIANUS SAMADOR, S.P

Pembina Utama Muda
NIP. 19700717 199703 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dalam melaksanakan kegiatannya diimplementasikan melalui program kegiatan dan sub kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.11.105.341.779,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.10.993.087.909,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp112.253.870,-**

Pada akhir Tahun Anggaran 2024, total realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka adalah sebesar **Rp10.442.553.092,-** atau **90,03%** yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp10.356.225.472,-** atau **94,21%** dan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp88.327.620,-** atau **78,69%**.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka terdapat hambatan/kendala antara lain:

- 1) Jumlah pegawai yang masih kurang;
- 2) Masih rendahnya kualitas pelayanan;

- 3) Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM perencana;
dan
- 4) Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka telah mengajukan usulan penambahan pegawai, penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta mendorong aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka untuk mengikuti kegiatan Diklat dan Bimtek Melalui upaya tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat.

Maumere, 20 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka,



VALERIANUS SAMADOR, S.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19700717 199703 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhsar Eksekutif iii

Daftar Isi v

Bab I Pendahuluan 1

 A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja
 dan Transmigrasi Kab. Sikka 1

 B. Aspek Strategis Organisasi.....7

 C. Struktur Organisasi8

 D. Kegiatan dan Layanan Produk Dinas Tenaga Kerja
 dan Transmigrasi Kab. Sikka 10

 E. Sistematika Penyajian 11

Bab II Perencanaan Kinerja 13

 A. Rencana Strategis 13

 B. Indikator Kinerja Utama..... 17

 C. Perjanjian Kinerja 18

Bab III Akuntabilitas Kinerja24

 A. Capaian Kinerja24

Bab IV Penutup47

 A. Kesimpulan.....47

 B. Saran 48

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pencapaian 10

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 15

Tabel 2.2. Indikatator Kinerja Utama 17

Tabel 2.3. Perjanjian kinerja Berbasis Anggaran 19

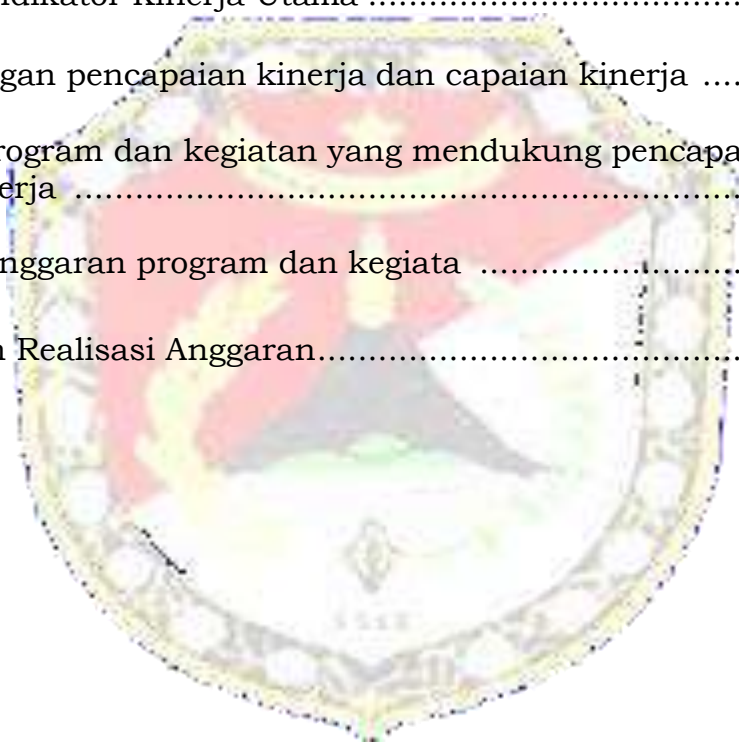
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 25

Tabel 3.2. Perbandingan pencapaian kinerja dan capaian kinerja 25

Tabel 3.4. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
target kinerja 23

Tabel 3.5 Realisasi anggaran program dan kegiata27

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Anggaran..... 30



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dimaksud, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai Tugas :

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - d. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - e. pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - f. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan pelatihan kompetensi dan produktivitas serta penyebarluasan informasi kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - h. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

(1) Sekretariat dalam melaksanakan tugas

- a. koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
- f. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- g. koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian;
- b. penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;

- e. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- g. fasilitasi pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- i. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- j. pengelolaan naskah Dinas, kearsipan dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan dan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

- (1) Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
 - c. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - d. pelaksanaan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - e. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - f. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

- g. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultansi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- h. pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- j. pengumpulan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- k. perencanaan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- l. pelaksanaan analisa kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- m. perancangan kesiapan materi pelatihan kerja;
- n. penyiapan kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- o. pengumpulan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- p. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- q. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- r. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- s. penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- t. penyiapan program pelatihan;
- u. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
- v. penyiapan calon peserta pelatihan kerja;
- w. pembuatan konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- x. penyiapan promosi peningkatan produktivitas;
- y. penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
- z. penyiapan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- aa. pelaksanaan pemantauan peningkatan produktivitas;
- bb. penyiapan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;

- cc. penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas;
- dd. perencanaan pemantauan tingkat produktivitas; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Informasi Kerja

Bidang Informasi Kerja mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyebarluasan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

(1) Bidang Informasi Kerja dalam melaksanakan tugas:

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar Daerah dan keluar negeri kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon tenaga kerja indonesia;
- g. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon tenaga kerja indonesia ke luar negeri;
- h. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan tenaga kerja pra dan purna penempatan;
- j. pelaksanaan koordinasipelayanan pemulangan dan kepulangan tenaga kerja;
- k. pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja purna;
- l. pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu)

- wilayah dalam Daerah;
- m. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi hasil penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan melaksanakan tugas:
- a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi Daerah;
 - c. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi sebagaimana mempunyai tugas menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang transmigrasi.

- (1) Bidang Transmigrasi melaksanakan tugas:
- a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. penyiapan petunjuk teknis penyediaan areal dan penyiapan permukiman transmigrasi;

- c. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan transmigrasi;
- d. penyusunan rencana dan program penataan lingkungan lokasi permukiman transmigrasi;
- e. penyediaan prasarana dan sarana transmigrasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang transmigrasi;
- g. penyiapan petunjuk teknis pengerahan dan penempatan;
- h. pelaksanaan bimbingan bagi transmigran;
- i. peningkatan kapasitas kelembagaan dan calon transmigran;
- j. pelaksanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi;
- k. pengendalian dan penghimpunan seleksi calon transmigran;
- l. pengaturan penempatan dengan lintas sektor;
- m. pelaksanaan urusan peningkatan program transmigrasi antara Daerah asal dengan Daerah penerima;
- n. penyiapan kebijakan pengembangan kelembagaan, sosial budaya dan ekonomi;
- o. peningkatan kapasitas kelembagaan dan warga transmigran;
- p. pelaksanaan promosi kerja sama dan kemitraan;
- q. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. Aspek Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka.

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

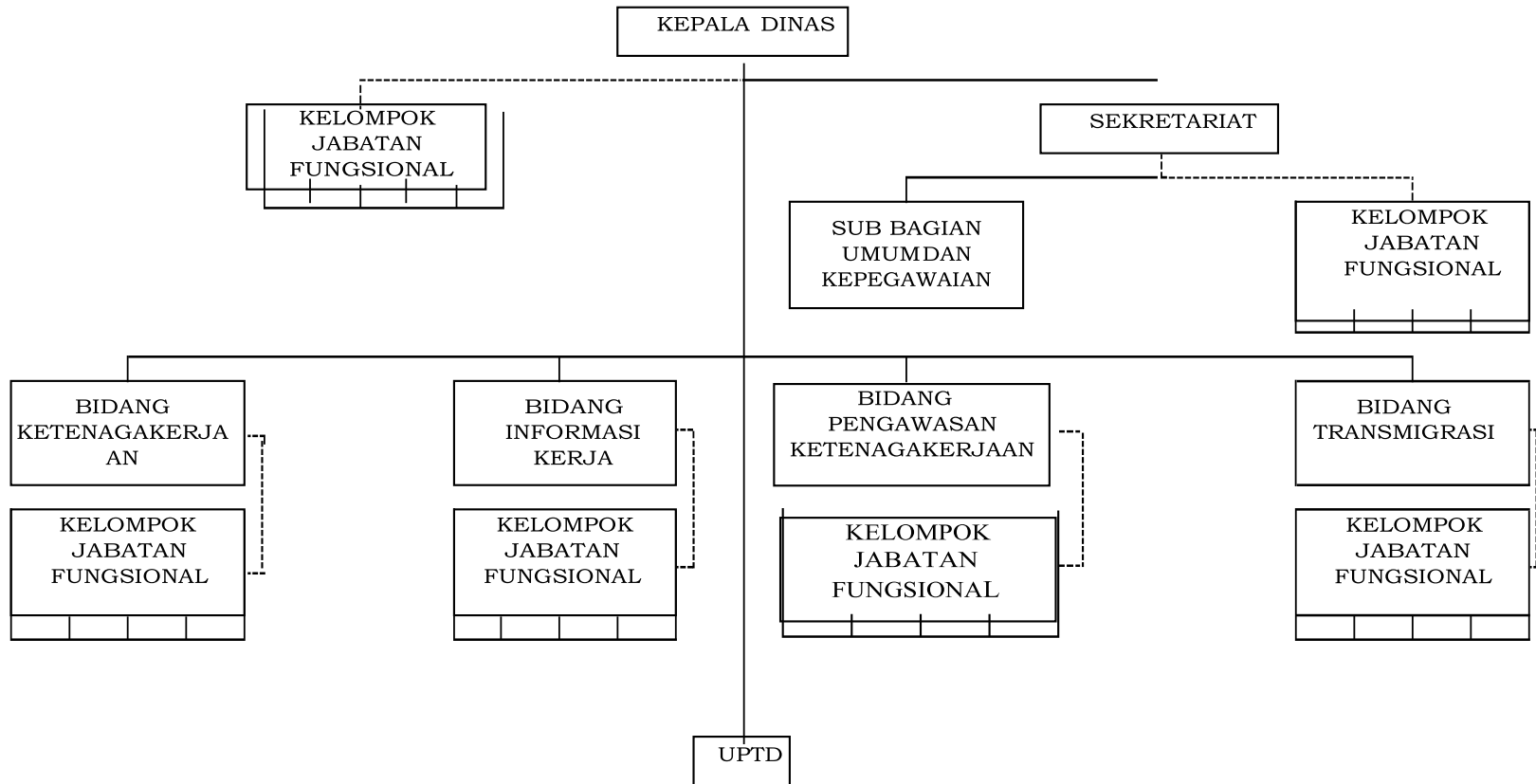
Berdasarkan kriteria tersebut dan setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai kondisi berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi, maka yang menjadi isu strategis pembangunan tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Sikka 3 (tiga) tahun ke depan adalah:

1. Masih tingginya angka pengangguran
2. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja
3. Pengembangan kawasan transmigrasi lokal yang belum optimal
4. Masih Rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan public pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sikka

C. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dengan struktur organisasinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka



D. Kegiatan dan Layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengemban urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan.

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya mengemban urusan wajib bukan pelayanan dasar tenaga kerja dan urusan pilihan transmigrasi.

Kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODI RENSTRA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,42	4,48	2,60	58,04
		Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Persen	17,05-15,03	20-19,63	-	0
		Pesentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	0,06	0,035	0,973	27,80
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah	3	2,65	0	0
		Indeks Sarana dan Prasaranan Pelayanan Publik	Jumlah	4	2,85	1,70	59,64

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasiKabupaten Sikka 2024

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategi) yang sedang dihadapi organisasi, antara lain:

- A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi;
- B. Aspek Strategis Organisasi;
- C. Struktur Organisasi;
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi;
- E. Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis;
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Strategi dan Arah Kebijakan
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- C. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2024;

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, (khusus untuk Perangkat Daerah pengampu SPM dapat membandingkan dengan capaian SPM);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- 1) Kesimpulan
- 2) Saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Rencana Strategis, cita-cita atau impian akan sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang diinginkan adalah kondisi akhir periode yang harus dapat diukur pencapaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha pembangunan yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Kabupaten Sikka melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menuju kehidupan yang bahagia.

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka serta mengacu pada RPJP Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 sebagai landasan idiil dan filosofis pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang dinamis dan berkesinambungan, Pembangunan Kabupaten Sikka yang akan dicapai selama tiga tahun mendatang (2024-2026)

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

1. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah penjabaran dan implementasi sasaran daerah Kabupaten Sikka yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, antara lain

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka adalah menurunkan angka pengangguran, dengan Indikator tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka (%). Tujuan

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka adalah Menurunkan Kemiskinan Masyarakat, dengan Indikator tujuan Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan (%). Tujuan
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka adalah Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, mudah dicapai dan rasional dalam suatu indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama Tahun 2024-2026. sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai RPD Tahun 2024-2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran dari Tujuan tersebut adalah Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan indikator sasaran Persentase Penyerapan tenaga kerja.
- b. Sasaran dari tujuan tersebut adalah (1) Meningkatnya profesionalitas ASN dengan indikator sasaran Indeks profesionalitas ASN dan (2) Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator sasaran Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Capaian Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir tahun
			2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,51	4,48	4,45	4,42	4,42
2.	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	20,44	20 - 19,63	19,35 - 18,15	17,05 - 15,03	17,05 - 15,03
3.	Persentase Penyerapan tenaga kerja	0,035	0,04	0,05	0,06	0,06
4.	Indeks Profesionalitas ASN	7,5	80	90	100	100
5.	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	2,50	2,65	2,85	3,00	3,00

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka 2024

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selain menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka pada urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi juga menyelaraskan dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur serta kondisi capaian pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Sikka saat ini.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 disusun dengan tahapan : (1) Persiapan penyusunan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra-PD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra-SKPD serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan data empiris ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten Sikka 3 (tiga) tahun

terakhir (2020-2022); (2) Penyusunan rancangan awal Renstradiawali dengan identifikasi dan perumusan isu strategis, masalah pokok, masalah dan akar masalah, perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, melakukan analisis SWOT terhadap Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) Perangkat Daerah, Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threath*) dari kondisi eksternal terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Analisis SWOT menghasilkan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan menjadi rujukan dalam perumusan program/kegiatan/subkegiatan; (3) Melakukan sinkronisasi dan penyelarasan (*Cascading*) serta Asistensi dengan Tim Desk Penyusunan Renstra-PD di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka; (4) Penyusunan rancangan akhir Renstra-PD dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal PD menyesuaikan dengan hasil Desk dan Asistensi serta penyelarasan dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Renstra Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyempurnaan dimaksud bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dengan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka pada Tahun 2024.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024- 2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024- 2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang mana Indikator Utama Bapelitbang Kabupaten Sikka ini. Indikator Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2024	2025	2026	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,51	4,48	4,45	4,42	4,42
2	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	20,44	20 - 19,63	19,35 - 18,15	17,05 - 15,03	17,05 - 15,03

3	Persentase Penyerapan tenaga kerja	0,035	0,04	0,05	0,06	0,06
4	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	2,5	2,65	2,85	3	3
5	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	2,5	2,65	2,85	3	3

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka 2024

C. Perjanjian Kinerja Pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sikka kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka serta dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

Tabel 2.3.
Perjanjian kinerja Berbasis Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	279.778.500	288.171.855	296.817.011	APBD 2
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	234.778.500	239.171.855	242.817.011	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	214.778.500	216.171.855	218.817.011	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	23.000.000	24.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	22.000.000	24.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	22.000.000	24.000.000	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	25.000.000	27.000.000	30.000.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	25.000.000	27.000.000	30.000.000	

2	Program Penempatan Tenaga Kerja	503.477.980	518.582.319	534.139.789
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	315.750.000	300.000.000	270.000.000
	Pelayanan antar Kerja	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	270.000.000	280.000.000	250.000.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100.000.000	70.000.000	90.000.000
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000	0	20.000.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja online	30.000.000	50.000.000	50.000.000
	Job Fair/ Bursa Kerja	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	87.727.980	148.582.319	174.139.789
	Peningkatan Perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/pekerja migran Indonesia (PMI)	32.727.980	68.582.319	89.139.789
	Penyediaan pelayanan terpadu pada calon pekerja migran	35.000.000	50.000.000	50.000.000
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	20.000.000	30.000.000	35.000.000
3	Program Hubungan Industrial	75.000.000	77.250.000	79.567.500
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.500.000	21.000.000

	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.000.000	20.500.000	21.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	56.750.000	58.567.500	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	26.250.000	27.567.500	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.500.000	31.000.000	
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	48.471.600	49.925.748	51.423.520	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.471.600	49.925.748	51.423.520	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu)	33.712.000	35.894.000	38.562.000	

	Daerah Kabupaten/Kota			
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	14.759.600	14.031.748	12.861.520
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	88.974.600	91.643.838	94.393.153
	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>	88.974.600	91.643.838	94.393.153
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	30.000.000	32.000.000	33.000.000
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	58.974.600	59.643.838	61.393.153
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.839.164.312	2.924.339.241	3.012.069.419
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	20.200.000	22.000.000	23.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.200.000	22.000.000	23.000.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.537.039.312	2.601.555.241	2.679.569.419
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.501.239.312	2.565.055.241	2.642.569.419
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.800.000	36.500.000	37.000.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	87.725.000	81.700.000	87.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.500.000	17.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.725.000	8.200.000	10.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	51.000.000	53.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	7.000.000	7.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	28.000.000	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	28.000.000	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.800.000	135.200.000	132.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.200.000	30.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.800.000	105.000.000	102.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.800.000	32.884.000	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000	30.000.000	32.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	2.884.000	3.000.000	
	Penataan Organisasi	20.600.000	23.000.000	25.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20.600.000	23.000.000	25.000.000	
	TOTAL	3.834.866.992	3.949.913.001	4.068.410.392	

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka 2023 dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka dengan Bupati Sikka.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka tahun 2024- 2026. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2024 dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODI RENSTRA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	Persen	4,42	4,48	2,60	58,04
		Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan pengeluaran per-Kapita kurang dari Rp 582.932}}{\text{Jml Penduduk Periode Saat ini}} \times 100$	Persen	17,05-15,03	20-19,63	-	0
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jmlh Angkatan Kerja yang Bekerja}}{\text{Jmlh Angkatan Kerja}} \times 100$	Persen	0,06	0,035	0,973	27,80
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah pelayanan Ijin atau Rekomendasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pelayanan Ijin atau Rekomendasi yang diterbitkan}} \times 100$	Jumlah	3	2,65	0	0
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	$\frac{\text{Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan}} \times 100$	Jumlah	4	2,85	1,70	59,64

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka, 2024

Gambaran perbandingan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka 2023 dan Tahun 2024 yang mengalami perubahan pada beberapa indikator kinerja dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan pencapaian kinerja dan capaian kinerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA THN 2023 (%)	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA THN 2024 (%)	KET
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Tingkat	%	7	7,7	110	4,42	4,48	2,60	

	Penganggura n Terbuka								
2	Nilai Sakip	Nilai	A (90)	C (59)	CC (65,5)	A	B	68,05	
3	Nilai perencanaan	%	26,3	19,5	74,14	79	80	79,50	
4	Nilai pengukuran	%	22,9	15,9	69,43	70	72	71,5	
5	Nilai pelaporan kinerja	%	13	0	0,00	15	59	37	
6	Nilai evaluasi internal	%	10,1	0	0,00	12	70	41	
7	Nilai capaian kinerja	%	14,5	11,75	81,03	82	68,5	75,25	
8	Jumlah temuan BPK dan APIP	Angka	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka, 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

- a) Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan memiliki kualitas yang baik serta profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kaitan antara manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berhubungan erat sehingga menjadi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan :

Kegiatan pelatihan-pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan dan penganggarannya sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap

peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2024

1. pada tahun-tahun yang akan datang.
2. Melakukan pengawasan melekat internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai pada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai sesuai kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

b) **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana :**

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, aparaturnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka ditunjang dengan sejumlah sarana dan prasarana kerja. Kondisi yang ada sarana prasarana kantor penunjang pelaksanaan kegiatan kantor seperti laptop dan printer dari sisi jumlah dan ketersediaan pegawai belum memadai.

c) **Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja**

- a. Untuk tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 32 sub kegiatan secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Untuk tahun-tahun yang akan datang perlu diberi perhatian khusus terkait perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan, dan tertib dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sehingga pencapaian kinerja dapat meningkat dan presentase realisasi anggaran juga dapat terserap dengan baik. Dari 6 program, 17 kegiatan dan 32 sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Sikka semuanya sangat menunjang keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3.
Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 Renstra	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Capaian 2024
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik				
	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik				
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan				
	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.839.164.312	2.569.251.624	90,49
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.200.000	33.049.000	163,61
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.200.000	33.049.000	163,61
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.537.039.312	2.295.129.900	90,46
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.501.239.312	2.245.680.100	89,78

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.800.000	49.449.800	138,13
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.725.000	65.200.135	74,32
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.980.600	99,87
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.725.000	13.450.000	174,11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	36.769.535	73,54
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	11.606.000	96,72
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	11.606.000	96,72
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.800.000	107.416.560	82,76
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	29.510.795	98,37
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.800.000	77.905.765	78,06
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.852.870	36.294.696	91,07
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	29.000.000	33.594.696	115,84

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	2.700.000	96,43
		Penataan Organisasi	20.600.000	20.555.333	99,78
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20.600.000	20.555.333	99,78
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	279.778.500	7.447.526.052	2.661,94
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	234.778.500	7.440.974.052	3.169,36
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	214.778.500	7.429.922.052	3.459,34
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	11.052.000	55,26
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	825.000	4,13
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	825.000	4,13
		Konsultansi Produktivitas	25.000.000	5.727.000	22,91

		pada Perusahaan Kecil			
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	25.000.000	5.727.000	22,91
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	503.477.980	150.766.180	29,94
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	315.750.000	56.991.580	18,05
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	25.750.000	7.917.580	30,75
		Pelayanan antar Kerja	20.000.000	18.955.800	94,78
		Perluasan Kesempatan Kerja	270.000.000	30.118.200	11,15
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100.000.000	46.963.300	46,96
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000	7.168.580	14,34
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	30.000.000	33.309.720	111,03
		Job Fair/Bursa Kerja	20.000.000	6.485.000	32,43
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	87.727.980	46.811.300	53,36
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	32.727.980	27.810.500	84,97
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	35.000.000	19.000.800	54,29

		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	20.000.000	-	-
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	75.000.000	157.089.390	209,45
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	103.278.280	516,39
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.000.000	103.278.280	516,39
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	53.811.110	97,84
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.694.100	98,78

		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.117.010	97,06
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	152.205.800	117.920.179	77,47
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	137.446.200	117.920.179	85,79
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	48.471.600	31.780.510	65,57
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.471.600	31.780.510	65,57
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.712.000	17.226.240	51,10
		Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	14.759.600	14.554.270	98,61
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	88.974.600	86.139.669	96,81
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	88.974.600	86.139.669	96,81
		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	30.000.000	29.126.170	97,09

		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	58.974.600	57.013.499	96,67
--	--	---	------------	------------	--------------

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka, 2024

Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2024

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi anggaran program dan kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka
Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.779.207.646	2.569.251.624	92,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.159.560	33.049.000	99,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.159.560	33.049.000	99,67

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.492.963.961	2.295.129.900	92,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.484.111	2.245.680.100	91,90
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.479.850	49.449.800	99,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.728.630	65.200.135	89,65
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.998.630	14.980.600	99,88
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.300.000	13.450.000	87,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.430.000	36.769.535	86,66
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.996.210	11.606.000	96,75
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.996.210	11.606.000	96,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.906.415	107.416.560	99,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.999.915	29.510.795	98,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.906.500	77.905.765	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.852.870	36.294.696	91,07

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.052.870	33.594.696	90,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	2700000	96,43
Penataan Organisasi	20.600.000	20.555.333	99,78
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20.600.000	20.555.333	99,78
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.618.298.080	7.447.526.052	97,76
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	7.580.520.230	7.440.974.052	98,16
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	7.560.520.510	7.429.922.052	98,27
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	19.999.720	11.052.000	55,26
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.595.550	825.000	6,07

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.595.550	825.000	6,07
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	24.182.300	5.727.000	23,68
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	24.182.300	5.727.000	23,68
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	345.960.244	150.766.180	43,58
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	156.320.574	56.991.580	36,46
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	9.610.000	7.917.580	82,39
Pelayanan antar Kerja	19.990.440	18.955.800	94,82
Perluasan Kesempatan Kerja	126.720.134	30.118.200	23,77
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	132.137.200	46.963.300	35,54
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	49.992.800	7.168.580	14,34
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	44.649.490	333.09.720	74,60
Job Fair/Bursa Kerja	37.494.910	6.485.000	17,30
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	57.502.470	46.811.300	81,41
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon	32.726.290	27.810.500	84,98

Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	24.776.180	19.000.800	76,69
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	-	0	0
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	241.575.570	157.089.390	65,03
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.656.000	103.278.280	55,33
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	186.656.000	103.278.280	55,33
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	54.919.570	53.811.110	97,98

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.939.850	24.694.100	99,01
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.979.720	29.117.010	97,12
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	120.300.239	117.920.179	98,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	120.300.239	117.920.179	98,02
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	31.994.110	31.780.510	99,33
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.994.110	31.780.510	99,33
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu)	17.434.240	17.226.240	98,81

Daerah Kabupaten/Kota			
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	14.559.870	14.554.270	99,96
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	88.306.129	86.139.669	97,55
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	88.306.129	86.139.669	97,55
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	29.729.750	29.126.170	97,97
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	58.576.379	57.013.499	97,33

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka, 2024

2.2.1. Pendapatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tidak mengelola Pendapatan Daerah

2.2.2. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang. Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka menganggarkan Belanja Pegawai sebesar **Rp.2.527.834.111,-** dengan realisasi sebesar **Rp2.328.805.100,-** atau 92,12.%.

2.2.3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp8.298.597.798,-** dengan realisasi anggaran sebesar **,-** atau **95,73%**.

2.2.4. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka menganggarkan Belanja Modal sebesar **Rp112.253.870,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp86.327.620,-** atau **76,90%**.

2.2.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja yang dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar **Rp166.650.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp83.328.000,-** atau **50,00%**.

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Capaian 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.779.207.646	2.569.251.624	92,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.159.560	33.049.000	99,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.159.560	33.049.000	99,67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.492.963.961	2.295.129.900	92,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.484.111	2.245.680.100	91,90
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.479.850	49.449.800	99,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.728.630	65.200.135	89,65
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.998.630	14.980.600	99,88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.300.000	13.450.000	87,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.430.000	36.769.535	86,66
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.996.210	11.606.000	96,75
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.996.210	11.606.000	96,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.906.415	107.416.560	99,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.999.915	29.510.795	98,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.906.500	77.905.765	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.852.870	36.294.696	91,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.052.870	33.594.696	90,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	2.700.000	96,43
Penataan Organisasi	20.600.000	20.555.333	99,78
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	20.600.000	20.555.333	99,78

Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.618.298.080	7.447.526.052	97,76
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	7.580.520.230	7.440.974.052	98,16
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	7.560.520.510	7.429.922.052	98,27
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	19.999.720	11.052.000	55,26
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.595.550	825.000	6,07
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.595.550	825.000	6,07
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	24.182.300	5.727.000	23,68
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	24.182.300	5.727.000	23,68
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	345.960.244	150.766.180	43,58
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	156.320.574	56.991.580	36,46
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	9.610.000	7.917.580	82,39
Pelayanan antar Kerja	19.990.440	18.955.800	94,82
Perluasan Kesempatan Kerja	126.720.134	30.118.200	23,77
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	132.137.200	46.963.300	35,54
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	49.992.800	7.168.580	14,34
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	44.649.490	333.09.720	74,60
Job Fair/Bursa Kerja	37.494.910	6.485.000	17,30
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	57.502.470	46.811.300	81,41
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	32.726.290	27.810.500	84,98
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	24.776.180	19.000.800	76,69

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	-	0	-
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	241.575.570	157.089.390	65,03
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.656.000	103.278.280	55,33
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	186.656.000	103.278.280	55,33
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	54.919.570	53.811.110	97,98
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.939.850	24.694.100	99,01
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.979.720	29.117.010	97,12
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	120.300.239	117.920.179	98,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	120.300.239	117.920.179	98,02
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	31.994.110	31.780.510	99,33
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.994.110	31.780.510	99,33
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.434.240	17.226.240	98,81
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	14.559.870	14.554.270	99,96
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	88.306.129	86.139.669	97,55

Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	88.306.129	86.139.669	97,55
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	29.729.750	29.126.170	97,97
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	58.576.379	57.013.499	97,33

Sumber : Olahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka, 2024

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya seluruh capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka pada Tahun 2024 dapat tercapai secara baik.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2024 berisikan informasi-informasi pengelolaan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka, Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2023 dapat dilihat pada Nilai SAKIP realisasi capaiannya (B), Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas, Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2023 Nilai perencanaan realisasi capaiannya 20,10%, Persentase Nilai Pengukuran Perangkat Daerah, Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2023 Nilai Pengukuran realisasi capaiannya 21,60%, Persentase Nilai Pelaporan Kinerja, Perangkat Daerah yang berkualitas, Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2023 Nilai Pelaporan Kinerja realisasi capaiannya 8,85%, Persentase Nilai Evaluasi Internal, Perangkat Daerah yang berkualitas, Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2022 Nilai Evaluasi Internal realisasi

capaiannya 17,50%, Persentase Nilai Capaian Kinerja, Perangkat Daerah yang berkualitas, Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2023 Nilai Capaian Kinerja realisasi capaiannya 68,05%, Persentase Nilai Jumlah temuan BPK dan APIP, Perangkat Daerah yang berkualitas, Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2023 Jumlah temuan BPK dan APIP realisasi capaiannya 0%.

b. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 alokasi anggaran Belanja Operasi yang digunakan untuk pencapaian sasaran khususnya Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai Belanja Modan dan Belanja Sosial.

Total Belanja adalah sebesar Rp11.105.341.779,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.442.553.425,- atau sebesar 94,03%. Dari persandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2024 Cukup baik.

Sebagai penutup Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya

4.2. Saran dan Rekomendasi

Evaluasi atas capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka, merupakan komitmen moral terhadap perbaikan kinerja yang dicapai. Hal ini menjadi landasan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sikka ke depan. Untuk itu marilah bersama-sama satukan kekuatan, rajut kebersamaan dan ciptakan kerjasama yang profesional.

Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sikka dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, melalui (1) peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana; (2) peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat.

Maumere, 20 Januari 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Sikka,



VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP.197107171997031009

LAMPIRAN



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48
		Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	20-19,63
		Pesentase Penyerapan Tenaga Kerja	0,035
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	2,65
		Indeks Sarana dan Prasaranan Pelayanan Publik	2,85

Jumlah Anggaran : Rp11.105.341.779,00

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten Sikka,



VALERIANUS SAMADOR, SP

Pembina Utama Muda

Nip. 197107171997031009

PERUBAHAN POHON KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2024

ISU / MASALAH POKOK	Masih tingginya angka pengangguran	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Disnakertans
----------------------------	------------------------------------	---

MASALAH	Rendahnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja	Meningkatnya jumlah angkatan kerja	Terbatasnya kesempatan kerja	Masih rendahnya profesionalitas ASN	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik
----------------	--	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--

AKAR MASALAH	Rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja (rendahnya pengetahuan, soft skill dan kepribadian)	Kurangnya informasi pasar kerja	Meningkatnya penduduk usia produktif setiap tahun	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan yang belum mendapat pekerjaan.	Lapangan kerja yang tersedia	Investasi yang dilakukan oleh perseorangan dan badan usaha swasta	Kemampuan pemerintah dalam melaksanakakan pembangunan	Masih rendahnya kompetensi aparatur	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana pelayanan publik
---------------------	--	---------------------------------	---	---	------------------------------	---	---	-------------------------------------	---

TUJUAN	Menurunkan angka pengangguran	Menurunkan Kemiskinan Masyarakat	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik
---------------	-------------------------------	----------------------------------	--

INDIKATOR TUJUAN	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
-------------------------	---	--	----------------------------------

SASARAN	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

INDIKATOR SASARAN	Persentase Penyerapan tenaga kerja	Persentase Penyerapan tenaga kerja	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

PROGRA M	PROGRM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTI FITAS TENAGA KERJA	PROGR AM PENEM PATAN TENAG A KERJA	PROGRAM HUBUNGA N INDUSTRIA L	PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
---------------------	---	--	---	--	--	--

PENGAN GGUNG JAWAB	KEPALA BIDANG KETENAGA KERJAAN	KEPAL A BIDAN G INFOR MASI KERJA	KEPALA BIDANG PENGAWAS AN KETENAGA KERJAAN	KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI	SEKRETARIAT DINAS
-----------------------------------	---	--	---	----------------------------	----------------------

Maumere, 08 Oktober 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka,



VALERIANUS SAMADOR, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 197107171997031009

**PERUBAHAN CASHCADING DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024**

KEPALA
DAERAH

RPD KABUPATEN SIKKA

VISI

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023

MISI I



TUJUAN 1	TUJUAN 2	TUJUAN 3
Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

INDIKATOR TUJUAN 1	INDIKATOR TUJUAN 2	INDIKATOR TUJUAN 3
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Menurunnya Angka kemiskinan	Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN STRATEGIS 1	SASARAN STRATEGIS 2	SASARAN STRATEGIS 3
Menurunnya Angka Pengangguran	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA SASARAN 3
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk Miskin	NILAI SAKIP

TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN
4,48%	12,19%	B

ESEL
ON II

RENSTRA



TUJUAN 1	TUJUAN 2	TUJUAN 3
Menurunkan angka pengangguran	Menurunkan Kemiskinan Masyarakat	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik

TARGET 1	TARGET 2	TARGET 3
4,48%	20 - 19,63	2,65

INDIKATOR TUJUAN 1	INDIKATOR TUJUAN 2	INDIKATOR TUJUAN 3
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik

TARGET SASARAN STRATEGIS 1	TARGET SASARAN STRATEGIS 2	TARGET SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA SASARAN 3
Persentase Penyerapan tenaga kerja	Persentase Penyerapan tenaga kerja	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

ESELON III	BIDANG KETENAGAKERJAAN	BIDANG INFORMASI KERJA	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	BIDANG TRANSMIGRASI	Sekretariat Dinas
------------	------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------

SASARAN PROGRAM 1	SASARAN PROGRAM 2	SASARAN PROGRAM 3	SASARAN PROGRAM 4	SASARAN PROGRAM 5	SASARAN PROGRAM 6
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 5	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 6
Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Hubungan Industrial	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

TARGET/SATUAN 1	TARGET/SATUAN 2	TARGET/SATUAN 3	TARGET/SATUAN 4	TARGET/SATUAN 5	TARGET/SATUAN
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM
	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
FUNGSIONAL TERENTU	Instruktur	Pengantar Kerja	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Analisis Kebijakan	Analisis Kebijakan	Sekretaris Dinas
ANGGARAN	Rp7.618.298.080,00	Rp345.960.244	Rp241.575.570,00	Rp31.994.110,00	Rp88.306.129,00	Rp2.779.207.646,00



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VALERIANUS SAMADOR, SP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE.,M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

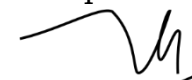
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Kedua,
PJ. BUPATI SIKKA


ADRIANUS FIRMINUS PARERA,
SE.,M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten Sikka,


VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SIKKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	4,48
		Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	%	20 - 19,63
		Persentase Penyerapan tenaga kerja	%	0,04
2.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	2,65
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks	2,65

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	2.779.207.646	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.618.298.080	APBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	345.960.244	APBD
4	Program Hubungan Industrial	241.575.570	APBD
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	31.994.110	APBD
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	88.306.129	APBD

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Kedua,
PJ. BUPATI SIKKA



ADRIANUS FIRMINUS PARERA,
SE.,M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Kabupaten Sikka,



VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

**RINCIAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	4,48	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	7.618.298.080
		Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	%	20 - 19,63	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	7.580.520.230
		Persentase Penyerapan tenaga kerja	%	0,04	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada tahun n	7.560.520.510
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka	19.999.720

					Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.595.550
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.595.550
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	24.182.300
					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	24.182.300
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	345.960.244

					Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	156.320.574
					Penyediaan Sumber Daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	9.610.000
					Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD/AKL	19.990.440
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	126.720.134
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	132.137.200
					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Perangkat Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	49.992.800

					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja online	44.649.490
					Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Partisipasi pemberi kerja dan pencari kerja yang terlibat	37.494.910
					Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	57.502.470
					Peningkatan Perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/pekerja migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	32.726.290
					Penyediaan pelayanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	24.776.180

					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	0
					Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial	241.575.570
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang disahkan	186.656.000
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP,PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	186.656.000
					Pencegahan Perselisihan	Persentase Pencegahan	54.919.570

					Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.939.850
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	29.979.720

					Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi	31.994.110
					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.994.110
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	17.434.240
					Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	14.559.870

					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	88.306.129
					Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	88.306.129
					Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	29.729.750
					Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	58.576.379
2	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	2,65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.779.207.646

		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks	2,65	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Diselesaikan	33.159.560
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.159.560
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.492.963.961
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.484.111
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	49.479.850

						/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.728.630
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14.998.630
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.300.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.430.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diadakan	11.996.210
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11.996.210

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	107.906.415
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	29.999.915
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	77.906.500
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.852.870
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37.052.870

					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.800.000
					Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	20.600.000
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20.600.000

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Kedua,
PJ. BUPATI SIKKA



ADRIANUS FIRMINUS PARERA,
SE.,M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka,



VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETRUS PITER, S.IP
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VALERIANUS SAMADOR, SP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sikka,

VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Pihak Pertama,

PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19701002200012106

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.779.207.648	APBD

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sikka,



VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Pihak Pertama,



PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19701002200012106



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VALERIANUS SAMADOR, SP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,

VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP. 197112142001121004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Orang	870

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	7.618.298.080	APBD

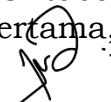
Pihak Kedua,



VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,



VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP. 197112142001121004

**RINCIAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Orang	870	7.618.298.080

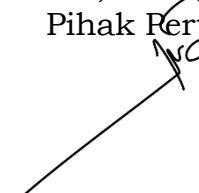
Pihak Kedua,



VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,



VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP. 197112142001121004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKHAELA E. THEOFILLA D. GULO, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VALERIANUS SAMADOR, SP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Maumere, 08 Oktober 2024
Pihak Pertama,

MIKHAELA E. THEOFILLA D.
GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFORMASI KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	Dokumen	1	156.320.574
				Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah pemberdayaan pekerja migran PMI	Paket	3	57.502.470
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pemeliharaan perangkat dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Paket	1	132.137.200

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penempatan Tenaga Kerja	345.960.244	APBD

Pihak Kedua,



VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,



MIKHAELA E. THEOFILLA D. GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

**RINCIAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFORMASI KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten /Kota Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten /Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pemberdayaan pekerja migran PMI Jumlah Pelayanan Antar Kerja Jumlah pemeliharaan perangkat dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Paket Dokumen Paket	3 1 1	57.502.470 156.320.574 132.137.200

Pihak Kedua,



VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP.197107171997031009

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,



MIKHAELA E. THEOFILLA D. GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WELLIBRORDA DUA BURA, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VALERIANUS SAMADOR, SP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

VALERIANUS SAMADOR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,

WELLIBRORDA DUA BURA, SH
Pembina
NIP. 197305121995032002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGAWASAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50	186.656.000
2	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	50	54.919.570

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Hubungan Industrial	241.575.570	APBD

Pihak Kedua,



VALERIANUS SAMADOR, SP

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,



WELLIBRORDA DUA BURA, SH

**RINCIAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGAWASAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA**

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Jumlah Peraturan perusahaan yang disahkan dengan perjanjian kerja bersama Jumlah Pencegahan dan penyelesain kasus hubungan industrial Mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Dokumen Kasus	50 50	186.656.000 54.919.570

Pihak Kedua,



VALERIANUS SAMADOR, SP

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,



WELLIBRORDA DUA BURA, SH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIA GORETI DUA TERIKA, S.Si
Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VALERIANUS SAMADOR, SP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

VALERIANUS SAMADOR, SP

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,

MARIA GORETI DUA TERIKA, S.Si

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIKKA

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk Yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah yang ditata	KK	101	31.994.110
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	UPT	1	88.306.129

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembangunan Transmigrasi	31.994.110	APBD
2	Pengembangan Transmigrasi	88.306.129	APBD

Pihak Kedua,



VALERIANUS SAMADOR, SP

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Pertama,



MARIA GORETI DUA TERIKA, S.Si



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanes Xaverius, S.Sos

Jabatan : Instruktur

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Viator Emanuel Bunga, ST

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan

VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP 197112142001121004

Pihak Pertama,
Instruktur,

JOHANES XAVERIUS, S.Sos
Penata Tk.I
NIP 196906171999031005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSTRUKTUR AHLI MUDA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100 %
		Persentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	100 %

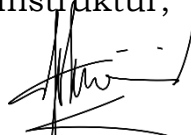
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 7.580.520.230	DAU SG dan DAU BG
2.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Rp. 24.182.300	DAU BG

Maumere, 08 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Ketenagakerjaan


VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP 197112142001121004

Pihak Pertama,
Instruktur,


JOHANES XAVERIUS, S.Sos
Penata Tk.I
NIP 196906171999031005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paula Susi Indrayati da Silva, SE

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Viator Emanuel Bunga, ST

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan

Pihak Pertama,
Pengawas Ketenagakerjaan,

VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP 197112142001121004

PAULA SUSI INDRAYATI DA SILVA, SE
Penata Tk. I
NIP 197105032006042031

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
UNTUK PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (ESELON IV) PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 %

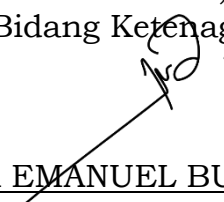
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 13.595.550	DAU SG

\

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan

Pihak Pertama,
Pengawas Ketenagakerjaan,


VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP 197112142001121004

PAULA SUSI INDRAYATI DA SILVA, SE
Penata
NIP 197105032006042031



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Walburga Hale, SE

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Mikhaela E.T. Dua Gulo, S.IP

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kerja

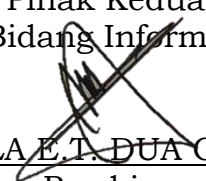
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

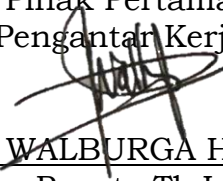
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja,


MIKHAELA E.T. DUA GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,


MARIA WALBURGA HALE, SE
Penata Tk.I
NIP. 197407181999032008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Pengantar Kerja - Pencari Kerja - Purna PMI	- Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi - Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL - Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya - Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani - Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	1 orang 24 orang 10 orang 10 orang 3 orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	29.600.440,-	DAU BG
	- <i>sub kegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja</i>	9.610.000,-	DAU BG
	- <i>Pelayanan antar kerja</i>	19.990.440,-	DAU BG
2.	<i>Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota</i>	57.502.470,-	DAU BG
	- <i>Peningkatan pelindungan dan kompetensi CPMI/PMI</i>	32.726.290,-	DAU BG
		24.776.180,-	DAU BG

	- <i>Penyediaan layanan terpadu pada CPI</i>		
	- <i>Pemberdayaan PMI purna penempatar</i>	0,-	DAU BG

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja,



MIKHAELA E.T. DUA GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,



MARIA WALBURGA HALE, SE
Penata Tk.I
NIP. 197407181999032008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marselina Gadu, A.Md

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Mikhaela E.T. Dua Gulo, S.IP

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

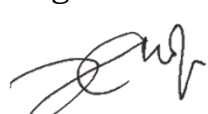
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja,


MIKHAELA E.T. DUA GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,


MARSELINA GADU, A.Md
Penata Tk.I
NIP. 197409251999032005

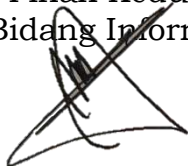
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masyarakat pengangguran dan setengah pengangguran	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	40 orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota - <i>sub kegiatan perluasan kesempatan kerja</i>	Rp. 126.720.134,- Rp. 126.720.134.-	DAU BG

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja,



MIKHAELA E.T. DUA GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,



MARSELINA GADU, A.Md
Penata Tk.I
NIP. 197409251999032005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kanisius Plewang, SE
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

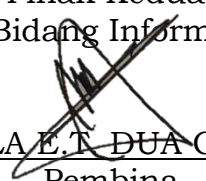
Nama : Mikhaela E.T. Dua Gulo, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

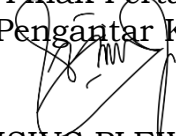
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja


MIKHAELA E.T. DUA GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,


KANISIUS PLEWANG, SE
Penata Tk.I
NIP. 197202011993031010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pencari kerja dan pemberi kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar pada Aplikasi pasar kerja online	2 dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	132.137.200,-	DAU BG
	- Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi pasar kerja	49.992.800,-	DAU BG
	- Pelayanan dan penyediaan Informasi pasar kerja online	44.649.490,-	DAU BG
	- Job fair/bursa kerja	37.499.910,-	DAU BG

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja,


MIKHAELA E.T. DUA GULO,
S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,


KANISIUS PLEWANG, SE
Penata Tk.I
NIP. 197202011993031010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yustina Diana Gama Putri, S.Sos
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Mikhaela E.T. Dua Gulo, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kerja

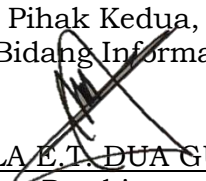
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja


MIKHAELA E.T. DUA GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,


YUSTINA DIANA GAMA PUTRI, S.Sos
Golongan IX
NIP3K. 198209032023212020

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
UNTUK JABATAN FUNSIONAL TERTENTU PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pencari kerja dan pemberi kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam aplikasi pasar kerja online	2 dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota - Pelayanan antar kerja	Rp. -	Pekerjaan Rutin
2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja	Rp. -	

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja,



MIKHAELA E.T. DUA GULO,
S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,



YUSTINA DIANA GAMA PUTRI,
S.Sos
Golongan IX
NIP3K. 198209032023212020



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benyamin Beny Nuba
Jabatan : Ahli Pertama Pengantar Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Mikhaela E.T. Dua Gulo, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kerja

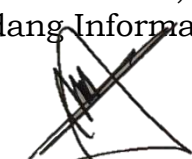
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

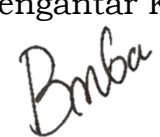
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja,


MIKHAELA E.T. DUA GULO, S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,


BENYAMIN BENY NUBA, SM
Golongan IX
NIP. 198407092024211004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
AHLI PERTAMA PENGANTAR KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Pengantar Kerja - Pencari Kerja - Purna PMI	- Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi - Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL - Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya - Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani - Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	1 orang 24 orang 10 orang 10 orang 3 orang

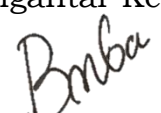
NO	KEGIATAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(8)
1.	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	DAU BG
	- <i>sub kegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja</i>	DAU BG
	- <i>Pelayanan antar kerja</i>	DAU BG
2.	<i>Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota</i>	DAU BG
	- <i>Peningkatan pelindungan dan kompetensi CPMI/PMI</i>	DAU BG
	- <i>Penyediaan layanan terpadu pada CPMI</i>	DAU BG
	- <i>Pemberdayaan PMI purna penempatan</i>	DAU BG

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Kerja,


MIKHAELA E.T. DUA GULO,
S.IP
Pembina
NIP. 197109092005012020

Pihak Pertama,
Pengantar Kerja,


BENYAMIN BENY NUBA, SM
Golongan IX
NIP. 198407092024211004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISKA DUA WIDA, SE
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WELLIBRORDA DUA BURA, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WELLIBRORDA DUA BURA, SH
Penata Tk. I
NIP. 197305121995032002

Maumere, 10 Oktober 2024
Pihak Pertama,

FRANSISKA DUA WIDA, SE
Penata Tk. I
NIP. 196712212000122001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA PADA BIDANG
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	kasus	30
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang disahkan	Dokumen	30

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	54.919.570	APBD
2.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.658.000	APBD

Mauumere, 10 Oktober 2024
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



WELLIBRORDA DUA BURA, SH
Penata Tk. I
NIP. 197305121995032002



FRANSISKA DUA WIDA, SE
Penata Tk. I
NIP. 196712212000122001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadir Tamal Lelang
Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Maria Goretti Dua Terika, S.Si
Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Transmigrasi


MARIA GORETTI DUA
TERIKA, S.Si
Pembina

NIP 197202242000122004

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan,


KADIR TAMAL LELANG
Penata Tk.I

NIP 196705101991031010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Presentase pembangunan kawasan transmigrasi	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Sub kegiatan : <i>Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi</i> - Sub kegiatan : <i>Koordinasi dan Sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu kabupaten</i>	Rp. 31.994.110 Rp. 14.559.870 Rp. 17.434.240	DAU

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Transmigrasi



MARIA GORETTI DUATERIKA, S.Si
 Pembina
 NIP 197202242000122004

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan,



KADIR TAMAL LELANG
 Penata Tk.I
 NIP 196705101991031010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Novianti Dua Nona, SE
Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Maria Goretti Dua Terika, S.Si
Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Transmigrasi

MARIA GORETTI DUA TERIKA, S.Si
Pembina
NIP 197202242000122004

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan,

MARIA NOVIANTI DUA NONA, SE
Penata
NIP 197711072009012003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Presentase pengembangan kawasan transmigrasi	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sub kegiatan : <i>penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman</i> - Sub kegiatan : <i>Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman</i>	Rp. 88.306.129 Rp. 58.576.379 Rp. 29.729.750	DAU BG DAU SG

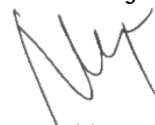
Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Transmigrasi



MARIA GORETTI DUA TERIKA, S.Si
Pembina
NIP 197202242000122004

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan,



MARIA NOVIANTI DUA NONA, SE
Penata
NIP 197711072009012003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : THOMAS AQUINO PARERA, SE, Ak
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PETRUS PITER, S.IP
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

PETRUS PITER, S.IP

THOMAS AQUINO PARERA, SE, Ak

Pembina Tk. I

Penata Tk. I

NIP. 197010022000121006

NIP. 197807052005011014

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA SEKRETARIAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA

NO .	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN	TAR GET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkat nya Kualitas Manajeme n Kinerja	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telpone, air dan listrik	Mempelajari ketentuan/juklak /juknis Keuangan dan Aset	dokumen	12
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorinya dan jumlah tenaga Non PNS yang dibayarkan honorinya	Melakukan verifikasi dan meneliti	dokumen	250
				kelengkapan SPP Menyiapkan Surat	dokumen	250
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	perintah membayar (SPM)	dokumen	250
				Membuat laporan keuangan	buku	1
				tahunan Melakukan penilaian prestasi kerja staf	ASN	1
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Mendistribusikan tugas kepada staf	Kali	12
				Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis	kali	12
	2	Meningkat nya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		-	
					-	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		Unit	4
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		Unit	7

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.999.915	DAU
2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	77.906.500	DAU
3.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	11.996.210	DAU
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	DAU
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	49.479.850	DAU

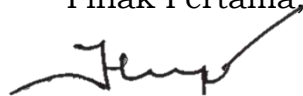
Pihak Kedua,



PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



THOMAS AQUINO PARERA, SE, Ak
Penata Tk. I
NIP. 197807052005011014



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIA NOGO, A.Md
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PETRUS PITER, S.IP
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PETRUS PITER, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

MARIA NOGO, A.Md

Penata

NIP. 197310242006042009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIKKA**

NO .	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan jumlah tenaga Non PNS yang dibayarkan honoranya	Mengagenda dan mengaarsipkan surat *Surat masuk *Surat keluar	surat surat	850 500
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	Mengagendakan SPPD Membuat daftar hadir PNS dan Non PNS Membuat daftar hadir Apel Senin	kali kali	750 12
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan dan jumlah tenaga Non PNS yang dibayarkan honoranya	Merekap daftar hadir PNS dan Non PNS Membuat daftar usulan Berkala	kali ASN	12 8
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Membuat SKP PNS Membuat daftar usulan kenaikan pangkat	ASN ASN	28 5
		Penyediaan makan dan minum	Jumlah orang makan dan minum untuk rapat dan tamu	Mendistribusikan tugas kepada staf Melakukan penilaian prestasi kerja staf	kali ASN	12 1
				Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis	kali	12
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Pemeliharaan ritun/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	37.052.870	DAU
2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	77.906.500	DAU
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.300.000	DAU

Pihak Kedua,



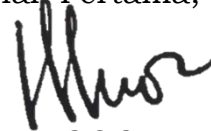
PETRUS PITER, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



MARIA NOGO, A.Md

Penata

NIP. 197310242006042009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROMOALDUS SMAYUNI NAI, ST
Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PETRUS PITER, S.IP
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

ROMOALDUS SMAYUNI NAI, ST
Penata Tk. I
NIP. 197606262011011004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERENCANA AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA

NO.	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring , Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Lksana	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	Membuat RKA, RKA mendahului perubahan dan RKA perubahan	dokumen	3
				Menginput DPA, DPA mendahului perubahan dan DPA perubahan	kali	3
				Membuat Renstra dinas 2018-2023	dokumen	1
				Membuat LAKIP	dokumen	1
				Membuat LPPD	dokumen	1
				Membuat Perjanjian Kinerja	dokumen	2
				Membuat IKU	dokumen	1
				Membuat RKT	dokumen	1
				Menginput RUP	kali	3
				Membuat Laporan Evaluasi Renja	dokumen	4
				Membuat Laporan BKP	kali	12
				Membuat Laporan monev	kali	12
				Membuat Suket	dokumen	11
				Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis	Kali	12

Membuat	cashcading dan	Pohon Kinerja	Dokumen	2
---------	----------------	---------------	---------	---

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.159.560	DAU
2.	Monitoring , Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Lksana	20.600.000	DAU

Pihak Kedua,

PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024
Pihak Pertama,

ROMOALDUS SMAYUNI NAI, ST
Penata Tk. I
NIP. 197606262011011004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikbal Gazali, S.Kom
Jabatan : Analis Bahan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Viator Emanuel Bunga, ST
Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

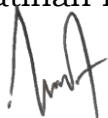
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan


VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP 197112142001121004

Pihak Pertama,
Analis Bahan Pengembangan
Standarisasi Kompetensi dan
Pelatihan Kerja,


IKBAL GAZALI, S.Kom
Penata Muda
NIP 199511012022031002

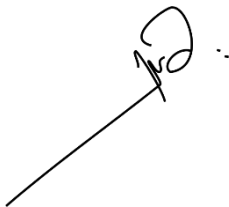
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNTUK ANALIS BAHAN PENGEMBANGAN STANDARISASI KOMPETENSI DAN
PELATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 13.595.550	DAU SG

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan



VIATOR EMANUEL BUNGA, ST
Pembina
NIP 197112142001121004

Pihak Pertama,
Analisis Bahan Pengembangan
Standarisasi Kompetensi dan
Pelatihan Kerja,



IKBAL GAZALI, S.Kom
Penata Muda
NIP 199511012022031002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Trivonia Santi
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Willibrorda Dua Bura,SH
Jabatan : Kepala Bidang Kepengawasan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanjiakan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

PihakKedua,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan


Willibrorda Dua Bura,SH
Penata Tk1,III/d
NIP 197305121995032002

PihakPertama,
Pengadministrasi Umum,


Trivonia Santi
Pengatur Tk.1/IIId
NIP 198310182009012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI UMUM PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk dan keluar	Surat masuk dan keluar	30 surat
2	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran	Dokumen	1 dok
3	Memastikan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan	1 keg
4	Merencanakan dan melaksanakan administrasi umum	Dok	12 dok

Maumere, 10 Oktober 2024

PihakKedua,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan


Wellibrorda Dua Bura,SH

Penata Tk1,III/d
NIP 197305121995032002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum


Trivonia Santi
Pengatur Tk1/IId
NIP 198310182009012005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUVINA NONA LIES
Jabatan : Bendahara Barang pada sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sikka
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PETRUS PITER, S.IP
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

PETRUS PITER, S.IP

YUVINA NONA LIES

Pembina Tk. I

Pengatur Tk. I

NIP. 197010022000121006

NIP. 197603132008012013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
FUNGSIONAL UMUM BENDAHARA BARANG PADA SEKRETARIAT DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SIKKA

NO .	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUA N	TARGET
1.	Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana palayanan publik	- Menyusun Rencana Kerja, bahan, alat untuk pengelolaan dan penyusunan laporan sarana dan prasarana kantor, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku - Menerima dan mencatat penerimaan barang habis pakai - Mencatat pengeluaran/pendistribusian barang habis pakai - Menerima dan mencatat penerimaan barang inventaris - Mendistribusikan dan mencatat pengeluaran barang inventaris - Melaksanakan inventarisasi aset tetap - Membuat kode barang dan memasangnya pada setiap barang inventaris - Membuat dan mengisi kartu inventaris barang - Membuat dan mengisi kartu inventaris ruangan - Mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. - Melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan - Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan	Dokum en Dokum en dokum en dokum en kegiata n dokum en dokum en dokum en dokum en dokum en	1 12 12 12 12 1 512 350 30 15 2

Maumere, 10 Oktober 2024
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 197010022000121006


YUVINA NONA LIES
Pengatur Tk. I
NIP. 197603132008012013



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIDIANTY SHERLY R.T. NALU, S.Ak
Jabatan : Fungsional Umum Penyusun Program dan Anggaran pada sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sikka
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PETRUS PITER, S.IP
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Maumere, 10 Oktober 2024
Pihak Pertama,

PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 197010022000121006

FIDIANTY SHERLY R.T. NALU, S.Ak
Penata Muda
NIP. 199903212022032001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
FUNGSIONAL UMUM PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN PADA
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SIKKA

NO .	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGE T
1.	Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana palayanan publik	- Jumlah bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin) - Jumlah dokumen bahan penyusunan anggaran kegiatan berdasarkan rencana dan program kerja dari bidang-bidang dan sekretariat guna kelancaran penyusunan anggaran. - Jumlah klasifikasi bahan penyusunan program kerja dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat - Jumlah penelaahan dan penginputan data-data terkait rencana kegiatan dan alokasi anggaran pada aplikasi - Jumlah konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan tahun berjalan dan tahun berikutnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun dari bidang-bidang dan sekretariat - Jumlah bahan penyusunan laporan perkembangan kegiatan dengan menghimpun data capaian kegiatan dan realisasi anggaran dari bidang-bidang dan sekretariat guna evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kegiatan - Jumlah konsep laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jumlah pelaksanaan tugas lainnya	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	3 5 5 3 5 5 2

Pihak Kedua,


PETRUS PITER, S.IP
 Pembina Tk. I
 NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,


FIDIANTY SHERLY R.T.NALU,
S.Ak
 Penata Muda
 NIP. 199903212022032001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSTINA I. A. N. LINDA
Jabatan : Fungsional Umum Bendahara Pengeluaran pada sekretariat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sikka
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PETRUS PITER, S.IP
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sikka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

YUSTINA IMELDA A.N. LINDA
Penata Muda
NIP. 197309152007012018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
FUNGSIONAL UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SIKKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	- Membantu mengirim/mengambil laporan keuangan dan mengarsipkan dokumen - Melakukan penatausahaan belanja bendahara - Melaksanakan administrasi gaji pegawai - Melakukan rekapitulasi pengeluaran, verifikasi, evaluasi, analisa serta memberikan persetujuan atas dokumen pertanggungjawaban. - Melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pengelolaan barang daerah dan pelaporan. - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban - Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	Dokumen Kegiatan dokumen dokumen Kegiatan dokumen Laporan	12 12 12 5 5 12 100

Pihak Kedua,

[Signature]

PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



YUSTNA IMELDA A.N. LINDA

Penata Muda

NIP. 197309152007012018



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALEXANDER SUTRISNO, A.Md
Jabatan : Arsiparis pada sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sikka
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PETRUS PITER, S.IP
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PETRUS PITER, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

AELXANDER SUTRISNO
Golongan VIII
NIP3K. 198806082023211021

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ARSIPARIS PADA SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KAB. SIKKA

NO .	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana palayanan publik	- Mengelola arsip dinamis dan statis - Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya - Menjaga arsip dari kegiatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan lain-lain - Mengembangkan sistem kearsipan yang tepat - Mengolah informasi secara profesional - Merancang sistem layanan arsip yang aman dan tepat waktu - Melakukan pembinaan kearsipan - Menyusun publikasi arsip - Membuat daftar arsip vital - Melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi arsip yang akan dimusnahkan	Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen kegiatan	12 12 12 1 12 1 4 1 1 1 12

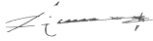
Pihak Kedua,



PETRUS PITER, S.IP
 Pembina Tk. I
 NIP. 197010022000121006

Maumere, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



AELXANDER SUTRISNO
 Golongan VIII
 NIP3K. 198806082023211021

**REALISASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TARGET				KEGIATAN	HASIL YANG DICAPAI				REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNG JAWAB
		TW 1	TW2	TW 3	TW 4		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			4,48		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		0,14	0,37	0,13		1.799.636.250	3.192.743.800	2.448.594.002	
	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan		20 - 19,63			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	26,67					5.390.000			
	Persentase Penyerapan tenaga kerja		0,04			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	3,22		2,72		17.050.000	1.591.300	36.321.840	2.028.440	
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	6,50	35,24	19,04	12,5		5.158.000		41.805.300	
						Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di	0,17	0,17	0,48	0,43			17.500.000,0	29.311.300	

						Daerah Kabupaten/Kota									
						Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25	25	25	25	2.08 0.32 0	2.080. 000	1.760. 000	97.357. 960	
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	20,25	16,9 2	23,5 8	30,2 5	3.84 3.77 0	9.253. 410	14.81 0.000	25.903. 930	

						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	50,0 0	50,0 0	14.7 82.0 00	2.743. 510	10.78 5.000	3.470.0 00	
						Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	0	0	0	100	1.02 0.00 0	1.113. 460	1.175. 000	82.831. 209	
						Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
						Pengembangan Satuan Permukiman									

						pada Tahap Kemandirian									
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	2,65				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57	14		29	11.682.000	9.194.000	9.603.000	2.570.000	Sekretaris Disnakertrans
	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	2,65				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,54		28,82	57,39	#####	740.239.148	776.284.910	287.169.651	Sekretaris Disnakertrans
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,34		30,39	60,95	9.850.060	7.534.200	35.238.375	12.577.500	Sekretaris Disnakertrans
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100				11.606.000				Sekretaris Disnakertrans

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	10,25	32,25	40,25	23.530.075	23.122.250	34.519.465	26.244.770	Sekretaris Disnakertrans
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,86	14,43	85,71	6.136.016	4.370.000	14.140.050	11.648.630	Sekretaris Disnakertrans
						Penataan Organisasi	12	9	40	39	5.790.0000	1.670.000	10.645.000	2.450.333	Sekretaris Disnakertrans

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka



VALERIANUS SAMADOR,SP
Pembina utama Muda
NIP .197107171997031009

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARG ET	REALI SASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	4,48	2,6	58,04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.779.207.646	2.569.251.624	92,45
	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan pengeluaran per-Kapita kurang dari Rp 582.932}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	20-19,63	0	0	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.618.298.080	7.447.526.052	97,76

		Jml Penduduk Periode Saat ini							
	Pesentase Penyerapan Tenaga Kerja	Jmlh Angkata n Kerja yang Bekerja X 100	0,035	0,973	27,8	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	345.960. 244	150.766.180	43,58
		Jmlh Angkata n Kerja							
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah pelayan an							
		Ijin atau Rekome ndasi yang diterbit kan X 100	2,65	0	0	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	241.575. 570	157.089.390	65,03
	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Sarana dan Prasara na yang di butuhk an X 100	2,85	1,7	59,64	PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRASI	31.994.1 10	31.780.510	99,33

		Jumlah Sarana dan Prasara na yang dibutuh kan							
						PROGRAM PENGEMBANG AN KAWASAN TRANSMIGRASI	88.306.1 29	86.139.669	97,55

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka



VALERIANUS SAMADOR,SP
Pembina utama Muda
NIP .197107171997031009



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA

SEBAGAI

JUARA 2

**KATEGORI KABUPATEN/KOTA
PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

KUPANG, 25 APRIL 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

AYODHIA G. L. KALAKE